

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Evaluasi Pengelolaan Air Bersih

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi pengelolaan air bersih pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghentian swastanisasi air. Evaluasi dilakukan sebuah tim yang sudah bekerja sejak Agustus 2018 dan akan berakhir pada 10 Februari 2019.

Timevaluasi tatakelola air ini hanya tinggal finalisasi mempersiapkan langkah dan *roadmap*-nya. Hasil evaluasi akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diambil keputusan demi kepentingan masyarakat Jakarta.

"Arahnya adalah kita ingin melaksanakan putusan MA. Bahkan, ada atau tidak putusan MA keinginan saya membangun jaringan air untuk setiap rumah tangga di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

menunggu tim evaluasi pengelolaan air sebelum mengambil keputusan. "Enggak apa-apa berdiskusi karena ini adalah masalah hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Menurut Anies, masalah utama DKI adalah pengelolaan air. Untuk itu, dia selalu mengusulkan dana pipanisasi air di bawah pengelolaan Pemprov DKI. Artinya, pemprov punya semangat sumber daya membangun air untuk semua. Bahkan, pada rapat pimpinan dia telah menghitung supaya 100% warga bisa dapat air saat PAM Jaya berusia 100 tahun. Saat ini usia PAM Jaya 96 tahun.

Ketua Tim Evaluasi Pengelolaan Air Minum Saefullah menuturkan, tim sudah memberikan beberapa opsi kepada gubernur untuk menindaklanjuti putusan MA. Namun, dia tidak bisa menyampaikan opsi-opsi tersebut kepada masyarakat lantaran keputusan berada di tangan gubernur.

Menurut dia, banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan seperti persoalan hukum dan kemaslahatan bahwa air merupakan kebutuhan pokok. "Tim tatakelola sudah bekerja. Rekomendasinya sudah dipaparkan. Arahannya kita tunggu," ujar Sekda DKI Jakarta itu.

Direktur PD PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengaku siap mengikuti keputusan gubernur perihal tin-

dak lanjut putusan MA. Apa pun keputusan gubernur pelayanan air tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik termasuk kualitas pelayanannya. "Meski putusan MA itu mengikat, kami harus tunggu keputusan gubernur. Kami tidak mau berandai-andai," kilahnya.

Dia menyebutkan kerja sama PAM Jaya dengan dua operator yakni Aetra dan Palyja sejak 1998 semestinya berakhir pada 2023. Bila kerja sama dihentikan sebelum kontrak tentunya harus ada denda administrasi yang dibayar sesuai yang tertulis dalam kontrak. Itu juga menjadi masukan dalam rekomendasi tim pengelola pada gubernur termasuk kesiapan operasional SDM PAM Jaya, aset, dan sebagainya.

"Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan gubernur," ujar Hernowo.

Anggota LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, prinsipnya pengelolaan air di Jakarta sudah melalui sengketa di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan MA pada April 2017 itu harus dilaksanakan.

Selama dua tahun putusan MA, Pemprov DKI belum menunjukkan langkah untuk me-

laksanakan putusan tersebut. Tim yang dibentuk pun tidak transparan padahal pada Maret 2018 Anies berkomitmen melaksanakan putusan tersebut.

"Kalau butuh transisi jelas-kan ke publik. Pemprov DKI itu wakil negara yang menjalankan undang-undang dan harus mengikuti putusan pengadilan. Tim sudah kerja enambulan kok belum ada hasil," katanya.

Arif menjelaskan, putusan MA No 31/Pdt/2017 telah memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemprov DKI, Aetra, dan Palyja karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air minum ke publik sesuai Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005 serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Hak Atas Air.

● bima setiyadi

Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan gubernur.

PRIYATNO BAMBANGHERNOWO
Direktur PD PAM Jaya

Dia pun mempersilakan semua pihak berdiskusi perihal penghentian swastanisasi air di Jakarta. Namun, dia tetap

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Evaluasi Pengelolaan Air Bersih

HENTIKAN SWASTANISASI AIR

Pemprov DKI siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghentian swastanisasi air bersih. Ke depan air sepenuhnya akan dikelola PAM Jaya.



"Arahnya adalah kita ingin melaksanakan putusan MA. Bahkan, ada atau tidak putusan MA keinginan saya membangun jaringan air untuk setiap rumah tangga di Jakarta."

ANIES BASWEDAN
Gubernur DKI Jakarta

Pascaputusan penghentian swastanisasi air

Pemprov DKI membentuk tim evaluasi tata kelola air. Tim ini sudah bekerja sejak Agustus 2018 dan akan berakhir pada 10 Februari mendatang. Tim evaluasi tinggal finalisasi mempersiapkan langkah dan *roadmap*-nya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin air bersih dikelola PAM Jaya.

PAM Jaya siap mengikuti keputusan gubernur perihal tindakan lanjut putusan MA. Apapun keputusan gubernur pelayanan air tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik termasuk kualitas layanannya.

TARIF AIR

- **Golongan I**
(rumah, tempat ibadah, asrama):
Rp1.050 per meter kubik
- **Golongan II**
(rumah sakit dan rumah susun):
Rp1.050-Rp1.575 per meter kubik
- **Golongan III**
(kios dan rumah tangga menengah): Rp3.350-Rp4.900 per meter kubik
- **Golongan IV**
(perkantoran, kedutaan besar, pabrik):
Rp6.825-Rp12.550 per meter kubik
- **Golongan V**
(pelabuhan):
Rp14.650 per meter kubik

AIR BERSIH DI JAKARTA

- Kebutuhan air bagi warga Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa sebanyak 26.100 liter per detik.
 - Kebocoran air mencapai 41%.
- Sumber: Pemprov DKI Jakarta/ diolah dari berbagai sumber*